



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN
KUNJUNGAN KERJA SPESIFIK KOMISI IV DPR RI
MASA SIDANG V TAHUN SIDANG 2023-2024
KE PROVINSI JAWA TENGAH**

*

**

**

*

JAKARTA 2024



LAPORAN
KUNJUNGAN KERJA SPESIFIK KOMISI IV DPR RI
MASA SIDANG V TAHUN SIDANG 2023-2024
KE PROVINSI JAWA TENGAH
1-3 Juli 2024

I. PENDAHULUAN

A. DASAR KUNJUNGAN KERJA

Dasar hukum yang dipergunakan dalam melaksanakan Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IV DPR RI Masa Sidang V Tahun Sidang 2023-2024 ke Provinsi Jawa Tengah adalah:

1. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang tentang Tata Tertib:
 - a. Pasal 59 ayat (4) butir d: Tugas komisi dalam bidang pengawasan adalah melakukan pengawasan terhadap kebijakan Pemerintah.
 - b. Pasal 59 ayat (5) butir f: Komisi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) dapat mengadakan kunjungan kerja.
2. Rapat Konsultasi Pengganti Badan Musyawah DPR RI tanggal 25 Maret 2024.
3. Keputusan Rapat Intern Komisi IV DPR RI tanggal 15 Mei 2024.

B. RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IV DPR RI Masa Sidang V Tahun Sidang 2023-2024 ke Provinsi Jawa Tengah adalah melakukan fungsi pengawasan dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi pokok DPR RI.

C. TUJUAN

Maksud dan tujuan dari Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IV DPR RI Masa Sidang V Tahun Sidang 2023-2024 ke Provinsi Jawa Tengah, khususnya

Kabupaten Kebumen adalah untuk mendapatkan informasi terkini dan secara langsung di lapangan dalam rangka:

1. Melihat secara langsung kondisi eksisting infrastruktur sarana dan prasarana di Bulog, Budi Daya Udang Berbasis Kawasan (BUBK), dan *Wisata Sagara View of Karangbolong*;
2. Mendapatkan gambaran secara komprehensif mengenai permasalahan Tata Kelola Perberasan di Perum Bulog, Budi Daya Udang Berbasis Kawasan (BUBK), dan *Wisata Sagara View of Karangbolong*;
3. Menyerap aspirasi pemerintah, stakeholder dan masyarakat dalam rangka mencari solusi terkait penyerapan gabah, distribusi pupuk, produksi udang, dan ekonomi kerakyatan di *Wisata Sagara View of Karangbolong*;
4. Mendapatkan informasi mengenai dukungan yang diperlukan dari Komisi IV DPR RI dalam rangka menyelesaikan permasalahan dan kendala yang dihadapi.

II. SUSUNAN TIM

Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IV DPR RI Masa Sidang V Tahun Sidang 2023-2024 ke Provinsi Jawa Tengah dipimpin oleh Bapak Budhy Setiawan (Wakil Ketua Komisi IV DPR RI) dan diikuti oleh para Anggota Komisi IV DPR RI.

III. PELAKSANAAN

A. PELAKSANAAN DAN LOKASI KUNJUNGAN

Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IV DPR RI Masa Sidang V Tahun Sidang 2023-2024 ke Provinsi Jawa Tengah dilaksanakan pada tanggal 1-3 Juli 2024, dengan agenda sebagai berikut:

1. Peninjauan dan Diskusi terkait Penyerapan Gabah Produksi Petani dan Distribusi Pupuk Bersubsidi di Gudang BULOG Selang Kebumen, Jl. Kutoarjo, Pekisen, Selang, Kec. Kebumen, Kab. Kebumen;
2. Peninjauan sekaligus Panen Udang dan Diskusi terkait Program Nasional Budi Daya Udang di Kabupaten Kebumen di *Shrimp Estate* di Desa Tegalretno/Desa Karanggadung, Kec. Petanahan, Kab. Kebumen; dan
3. Peninjauan dan Diskusi terkait Pengelolaan *Wisata Sagara View of Karangbolong, Karangtengah*, Buayan, Kab. Kebumen.

B. GAMBARAN UMUM

1. Penyerapan Gabah Produksi Petani dan Distribusi Pupuk Bersubsidi

Dalam rangka memenuhi stok pangan nasional di masa kini dan masa mendatang, Bulog telah melakukan berbagai upaya penyerapan gabah di sentra-sentra padi seperti di selirih wilayah Indonesia. Pemerintah telah melakukan penyerapan sampai dengan 30 ribu ton setara GKP (gabah kering panen) per harinya. Upaya pemanfaatan Cadangan Beras Pemerintah dengan menggunakan produksi dari dalam negeri adalah dalam rangka meminimalisir adanya impor. Selain itu, Bulog secara aktif melakukan pemantauan kepada petani yang akan panen raya, dan Bulog berkomitmen menjalankan sinergitas dan koordinasi dengan para pelaku usaha perberasan guna pemenuhan Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) melalui penyerapan hasil produksi gabah dan beras. Hal ini dilaksanakan dalam rangka meningkatkan ketahanan pangan melalui pemenuhan stok beras nasional yang bersumber dari produksi dalam negeri sebanyak-banyaknya.

Pupuk bersubsidi yang diperuntukan bagi petani tanaman pangan, berupa padi, jagung, dan kedelai, serta tanaman hortikultura seperti cabai, bawang merah, dan bawang putih. Selain itu juga diperuntukkan bagi petani perkebunan seperti tebu rakyat, kakao, dan kopi dengan luas lahan maksimal 2 ha, termasuk di dalamnya petani yang tergabung dalam Lembaga Masyarakat Desa Hutan, dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Anggaran subsidi pupuk di tahun 2024 sebesar Rp26 triliun dirasa masih tidak cukup untuk mengatasi langkanya pupuk subsidi. Karena baru memenuhi sepertiga dari kebutuhan kuota pupuk subsidi nasional yang mencapai Rp70 triliun. Untuk itu, Komisi IV DPR RI meminta Pemerintah dalam mendistribusikan pupuk bersubsidi benar-benar memantau dan berkordinasi dengan agen/kios-kios atau Balai Penyuluh Pertanian (BPP) agar tidak terjadi pemberian ganda dan penyalahgunaan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Selanjutnya pemutakhiran data Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) sangat diperlukan oleh Pemerintah karena untuk menentukan distribusi pupuk bersubsidi ke petani agar tepat sasaran dan merata.

2. Program Nasional Budi Daya Udang di Kabupaten Kebumen

Tambak Budi Daya Udang Berbasis Kawasan (BUBK) milik Kementerian Kelautan dan Perikanan di Kebumen merupakan aset negara terbesar di Indonesia yang perlu dijaga. Teknologi intensif di BUBK ini disinyalir mampu mencapai 40 ton/ha/siklus. Pemanfaatan penggunaan teknologi padat penebaran benih tinggi, serta pakan alami, pakan tambahan, dan input produksi lainnya yang dilengkapi dengan laboratorium, pabrik pakan, dan IPAL akan sangat mendukung keberlanjutan lingkungan dan mampu menjaga keseimbangan sumber daya ekosistem laut yang ada di sekitarnya. Berdasarkan catatan, tambak udang modern tersebut dibangun di atas areal seluas ±60 hektar. Hal tersebut diharapkan dapat menopang peningkatan produksi udang di tingkat nasional, peningkatan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP), serta kesejahteraan masyarakat (dengan adanya penyerapan ratusan tenaga kerja). Capaian tersebut diharapkan sejalan dengan pertumbuhan ekonomi nasional, dimana pada triwulan I tahun 2024 telah mencapai 5,11%. Harapannya ke depan pertumbuhan ekonomi Indonesia diperkirakan tetap kuat dalam kisaran 4,7-5,5% sebagaimana data Badan Pusat Statistik (BPS).

Terkait dengan kebutuhan pangan, komoditas Ikan (udang) akan menjadi salah satu komoditas makanan yang paling banyak diperdagangkan di dunia, dimana tahun 2035 diprediksi akan terjadi peningkatan jumlah penduduk Indonesia sebanyak 305 juta jiwa. Sedangkan tahun 2050 diprediksi penduduk dunia akan meningkat menjadi sebanyak 9,7 miliar, sehingga kompetisi mendapatkan pangan sangat tinggi. Maka dari itu produk ikan menjadi solusi dalam memenuhinya kebutuhan pangan manusia.

3. Pengembangan Wisata Alam dan Pemberdayaan Masyarakat di *Sagara View of Karangbolong*

Perum Perhutani merupakan Badan Usaha Milik Negara yang memiliki tugas dan wewenang untuk mengelola sumberdaya alam hutan negara berupa kawasan hutan lindung dan kawasan hutan produksi yang berada di Pulau Jawa dan Madura. Dalam hal ini Perum Perhutani memiliki peran strategis dalam mendukung sistem kelestarian lingkungan, sistem sosial

budaya dan sistem perekonomian masyarakat di dalam dan di sekitar kawasan hutan.

Orientasi pembangunan kehutanan telah mengalami pergeseran yaitu yang semula berorientasi pada produksi kayu dan kurang melibatkan masyarakat, menjadi lebih berorientasi pada pengelolaan ekosistem sumber daya hutan yang berbasis pada pemberdayaan masyarakat.

Pengembangan wisata alam dalam kerangka mewujudkan pelestarian sumber daya alam hayati dan ekosistemnya menjadi salah satu alternatif pilihan dalam pengembangan usaha di bidang kehutanan, karena bertujuan untuk mendorong dan meningkatkan pemanfaatan potensi serta keunggulan alam sebagai tujuan wisata yang menarik, serta untuk mendukung upaya peningkatan kesejahteraan dan mutu kehidupan masyarakat.

Saat ini konsep Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya telah disetujui dalam Pembicaraan Tingkat I di Komisi IV DPR RI. Beberapa hal yang diatur dalam Rancangan Undang-Undang dimaksud diantaranya adalah:

- a. Adanya pengaturan mengenai Areal Preservasi, yaitu areal di luar kawasan konservasi, yang dipertahankan kondisi ekologisnya untuk mendukung fungsi penyangga kehidupan ataupun kelangsungan hidup Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Areal Preservasi dapat berasal dari kawasan hutan lindung dan kawasan hutan produksi.
- b. Adanya pengaturan mengenai kegiatan pemanfaatan jasa lingkungan, diantaranya wisata alam, dimana dalam pengelolaannya harus mengutamakan 3 Pilar Konservasi.

Dalam hal ini, Perum Perhutani diharapkan dapat terus melakukan upaya dalam rangka pemberdayaan masyarakat dalam pengembangan wisata alam di wilayah kerjanya.

Lebih lanjut, Perum Perhutani sebagai pemegang perizinan berusaha pemanfaatan hutan pada kawasan hutan lindung dan hutan produksi diharapkan dapat berperan serta aktif dalam melaksanakan kegiatan konservasi pada Areal Preservasi yang berada di wilayah kerjanya.

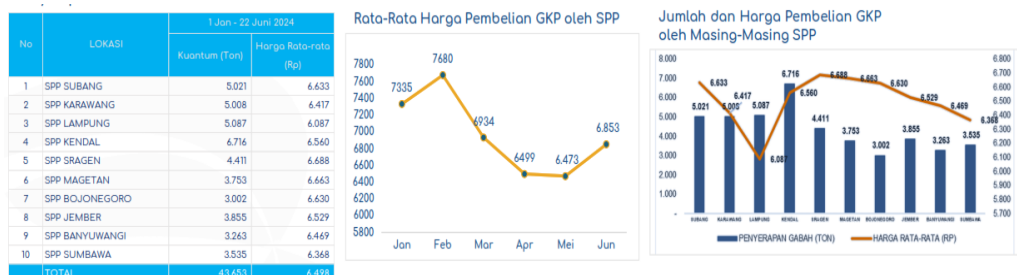
C. HASIL KUNJUNGAN KERJA

1. Penyerapan Gabah Produksi Petani dan Distribusi Pupuk Bersubsidi

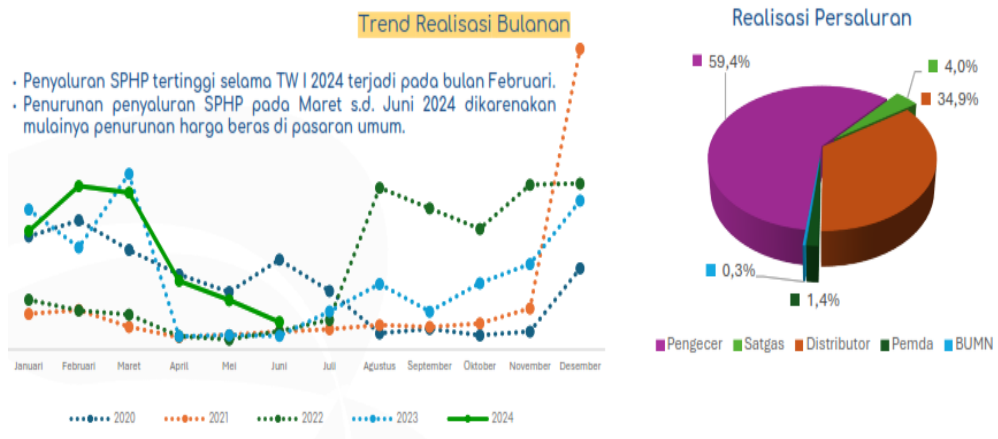
- Terjadi tren penurunan harga pada gabah di tingkat petani maupun beras di tingkat penggilingan, grosir, dan eceran. Namun harga pada bulan Mei 2024 untuk gabah di tingkat petani maupun beras di tingkat penggilingan grosir dan eceran masih tetap lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya Mei 2023 dan Mei 2022.
- Komoditas beras kembali mengalami deflasi sebesar 3,59%, hal ini disebabkan karena ketersediaan stok masih cukup, dimana pada 29 Provinsi mengalami deflasi, 1 Provinsi mengalami stabil dan 8 Provinsi mengalami inflasi.
- Total Pengadaan Beras Dalam Negeri sampai dengan 27 Juni 2024 sebanyak 724.179 Ton setara beras, dan total Importasi dari Tahun 2022 s.d. Tahun 2024 sebanyak 5.417.963 Ton, dengan rincian 2022 sebanyak 57.417 ton, 2023 sebanyak 2.809.179 ton, dan tahun 2024 importasinya sebanyak 2.551.367 ton.
- Posisi stok beras sebanyak 1,57 juta ton dan sebaran komoditas pangan per 6 - 27 Juni 2024 dapat dilihat sebagai berikut:



- Penyerapan Gabah oleh Infrastruktur Pasca Panen Perum BULOG per 22 Juni 2024 dengan total 43.653 ton.



- f. Penyaluran SPHP Beras sampai dengan 27 Juni 2024 di tingkat Nasional telah terealisasi sebanyak 807.267 Ton atau tercapai 67,27% dari target sebesar 1.200.000 Ton, dan Penyaluran SPHP Beras di Kanwil D.I Yogyakarta telah terealisasi sebanyak 18.674 Ton.
- g. Target dan Strategi SPHP:
- 1) Penyaluran SPHP dimaksimalkan 250.000 ton/bulan.
 - 2) Memastikan keberadaan pengecer beras SPHP di pasar tradisional dan ritel modern.
 - 3) GPM dan BULOG Siaga berkoordinasi dengan Pemda.



- h. Tekait realisasi penyaluran jagung di DI Yogyakarta sebanyak 3.247 ton dan secara nasional sebanyak 303.154 ton.

No	Data per Provinsi	Pagu (Ton)	Total Penyaluran (Ton)	%	Sisa Pagu (Ton)
1	DI Yogyakarta	3.247	3.247	100,00%	-
2	Kalimantan Selatan	8.760	8.754	99,93%	6
3	Kalimantan Timur	2.515	2.513	99,91%	2
4	Sumatera Selatan	9.472	9.411	99,36%	61
5	Banten	4.741	4.700	99,13%	41
6	Jambi	3.810	3.760	98,68%	50
7	Jawa Tengah	53.673	50.291	93,70%	3.382
8	Bali	885	806	91,07%	79
9	Lampung	19.896	17.618	88,55%	2.278
10	Jawa Barat	23.165	20.323	87,73%	2.842
11	Sumatera Barat	11.111	9.226	83,04%	1.885
12	Sumatera Utara	10.570	8.518	80,59%	2.052
13	Jawa Timur	216.460	157.712	72,86%	58.748
14	Kalimantan Barat	6.749	3.371	49,95%	3.378
15	Sulawesi Utara	3.261	1.171	35,91%	2.090
16	Nusa Tenggara Barat	5.444	1.094	20,09%	4.350
17	Sulawesi Tengah	1.530	288	18,86%	1.241
18	Sulawesi Selatan	5.860	349	5,96%	5.511
		391.150	303.154	78%	87.997

i. Kemitraan dengan Penggilingan Kecil dan Petani

No	Keterangan	Rekan Kerja Sama	Luas Lahan
1	Perjanjian Kerjasama Kemitraan Budidaya Pertanian	PT. Pandawa Agri Indonesia (PAI)	31 Ha
2	Perjanjian Kerjasama Pendampingan Budidaya Pertanian	PT. Agri Sparta	33 Ha
3	Perjanjian Kerjasama Kemitraan Sinergis Budidaya Pertanian	PT. Mitra Bumdes	75 Ha
4	Perjanjian Kerjasama Kemitraan Sinergis Budidaya Pertanian	PB. Sehati	662,67 Ha
5	Perjanjian Kerjasama Kemitraan Sinergis Budidaya Pertanian	CV. Zinta Tiga Terang	543,7 Ha
6	Deklarasi Bersama Program Makmur Kabupaten Jember	PT. Petrokimia Gresik, SPP BULOG Jember, KUD Duta Niaga, Gapoktan Tani Makmur 13	500 Ha
7	Nota Kesepahaman Kemitraan Sinergis Dalam Optimalisasi Produktivitas Pertanian dan Pembelian Hasil Panen Melalui Program Makmur Serta Budidaya Lainnya	PT. Pupuk Indonesia (PIHC)	1000 Ha
8	Perjanjian Kerjasama Kemitraan Sinergis	PT. Sang Hyang Seri (SHS)	100 Ha
9	Nota Kesepahaman Penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi	Universitas Hasanuddin (MaU)	-
10	Perjanjian Kerjasama Sains, Teknologi, Pendidikan, dan Inovasi dalam Bidang Pertanian Organik dan Pengembangan Budidaya Pertanian	Universitas Hasanuddin (PKS)	-
11	Perjanjian Kerjasama Pendampingan dan Pengembangan Budidaya Pertanian	Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN)	-
12	Nota Kesepahaman Pembiayaan Budidaya	PT Bank Negara Indonesia (BNI)	-

Aspirasi:

- Peningkatan slokasi pompanisasi/sumur bor, mengingat kondisi musim kemarau masih berlangsung, waduk bermasalah, hujan masih jarang, khususnya pada kondisi sawah tadah hujan yang sangat membutuhkan air.
- Penyaluran beras belum selesai di daerah-daerah sehingga perlu strategi dan koordinasi dengan berbagai instansi terkait.
- Harga gabah bisa naik hingga Rp2.000,- tidak hanya Rp1.000,-
- Penggilingan beras menyusut sehingga perlu bantuan alsintan dan pendanaan modal.
- Pupuk masih langka di lapangan sehingga perlu dicarikan solusinya. Terlebih penggarap petani sawah bukan pemilik sawah sehingga belum terdaftar di RDKK. Hal ini yang menjadi faktor krusial dalam keakuratan data guna memperoleh pupuk bersubsidi.

Tanggapan Komisi IV DPR RI:

- Perlu identifikasi titik-titik yang membutuhkan pompa/sumur bor di daerah yang kering atau butuh air
- Penyaluran beras masih dalam proses distribusi, mengingat masih cek by name by address sehingga validasi dan identifikasi memerlukan waktu yang cukup lama.
- Pembelian gabah telah menyesuaikan dengan kebijakan pemerintah dan telah sesuai dengan HPP yang ditetapkan yakni naik sebesar Rp1.000,00.

- d. Pemberian bantuan alsintan dan akses bantuan permodalan akan menyesuaikan dengan alokasi yang ada di kementerian dan kebutuhan petani.
- e. Bagi petani yang belum mendapatkan pupuk bersubsidi dapat mendaftarkan ke Balai Penyuluh Pertanian (BPP) Kabupaten setempat, khususnya petani penyewa agar masuk di RDKK upfate setiap 4 bulan sekali.

2. Program Nasional Budi Daya Udang di Kabupaten Kebumen

- a. Budi Daya Udang Berbasis Kawasan (BUBK) di Kabupaten Kebumen merupakan tambak udang modern terbesar di Indonesia dengan luasan lahan potensial mencapai 100 hektar.
- b. kegiatan budi daya di BUBK Kebumen seluruhnya menggunakan teknologi intensif dengan produktivitas mencapai 40 ton per hektare per siklus. Hasil panen 40 ton per hektare itu pun sudah sesuai dengan best practice budi daya udang modern saat ini.
- c. Tambak dengan teknologi intensif menerapkan padat tebar benih tinggi, sistem pengairannya menggunakan perangkat seperti kincir dan blower, hingga susunan petak tambak dibangun teratur menggunakan terpal berkualitas tinggi.
- d. BUBK Kebumen menjadi percontohan tambak udang modern berbasis kawasan yang mengedepankan keseimbangan ekologi dengan 149 petak yang ukurannya 1.600 m²/petak.
- e. BUBK Kebumen dilengkapi sejumlah infrastruktur utama di antaranya water intake, tandon, petak pemeliharaan, Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL), laboratorium uji kualitas air dan kesehatan ikan, gedung kantor, gudang pakan, gudang sarana produksi, mess operator hingga bangunan pascapanen.
- f. Fasilitas intake, outlet, tandon, hingga IPAL berfungsi untuk memastikan air yang diambil dari laut dan dikeluarkan kualitasnya tetap baik.
- g. Ada berbagai treatment pada IPAL dimana mulai dari pengendapan, oksigenisasi supaya kembali normal PH dan fisiknya agar saat air dilepas ke laut setidaknya sama seperti sedia kala dan tidak merusak lingkungan.

- h. Benih yang ditebar merupakan benih unggul hasil dari UPT atau lainnya dengan menerapkan prinsip dan cara budi daya ikan yang baik (CBIB).
- i. Penggunaan obat dan vitamin pada tambak udang untuk meningkatkan kesehatan.
- j. Rekrutmen pekerja dilapangan didominasi orang lokal Kab. Kebumen, kecuali pekerja yang memerlukan skill khusus didatangkan dari luar kab. Kebumen. Hal ini berdampak positif terhadap tindakan kriminal yang sering terjadi sebelum adanya BUBK dibangun.
- k. BUBK Kebumen menjadi pusat edukasi praktek lapangan oleh masyarakat dan mahasiswa dari berbagai universitas di seluruh Indonesia yang ingin belajar tentang budi daya udang.

Aspirasi:

- a. Kenapa pengelolaan BUBK Kebumen tidak diserahkan ke plasma atau kerjasama dengan pembudi daya setempat?
- b. Bagaimana langkah BUBK Kebumen kedepan dalam menghadapi terjangan ombak yang cukup kencang dari Samudera Indonesia agar tambak di pesisir selatan ini tetap utuh dan tidak hancur?

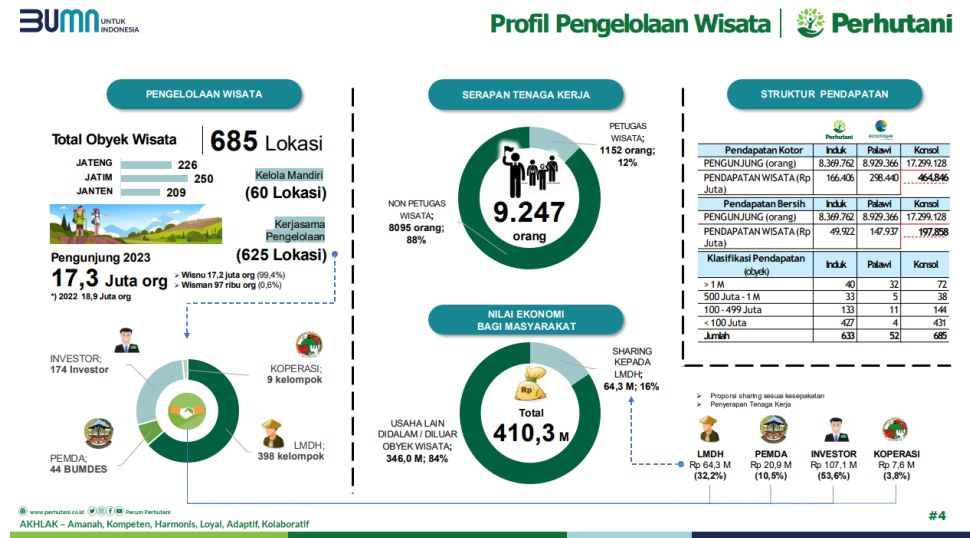
Tanggapan Komisi IV DPR RI:

- a. Belajar dari pengelolaan tambak udang di Lampung yang diserahkan ke plasma tidak berjalan dengan baik dan menimbulkan banyak konflik yang tidak selesai-selesai maka BUBK Kebumen pengelolaannya oleh Badan Layanan Umum dibawah Kementrian Kelautan dan Perikanan agar tetap eksis dan menjadi tempat edukasi bagi masyarakat dan mahasiswa seluruh Indonesia.
- b. Perlu ada dukungan dari Kementerian PUPR dalam membangun pembatas ombak dan juga perlu ada reboisasi di sempadan pantai guna meminimalisir ombak atau pasang air laut.

3. Pengembangan Wisata Alam dan Pemberdayaan Masyarakat di Segara View of Karangbolong

a. Penyampaian Informasi Perum Perhutani

1) Pengelolaan Wisata Perum Perhutani



Total objek wisata Perum Perhutani terdapat di 685 lokasi, yaitu:

- 60 lokasi dikelola secara mandiri oleh Perum Perhutani dan Palawi (anak perusahaan); dan
- 625 lokasi dikelola secara kerja sama dengan investor (174 investor), pemerintah daerah (44 BUMDES), koperasi (9 kelompok), serta LMDH (398 kelompok).

Ragam daya tarik wisata Perum Perhutani terdiri dari Air Terjun (104 destinasi), Pegunungan/ Pendakian (69 destinasi), Sungai, Telaga dan Waduk (26 destinasi), Air Panas (18 destinasi), Bumi Perkemahan (55 destinasi), Goa (19 destinasi), Kawah (7 destinasi), Hutan Alam (71 destinasi), Pantai (47 destinasi), Taman Rekreasi (237 destinasi), Situs (15 destinasi), serta Minat Khusus (17 destinasi).

Gambaran jumlah pengunjung:

- Tahun 2022 : 18,9 juta pengunjung
- Tahun 2023 : 17,3 juta pengunjung
- S.d. Mei 2024 : 8,1 juta pengunjung

Menyerap 9.247 orang tenaga kerja (1.102 orang petugas wisata dan 8.095 orang non petugas wisata), dengan nilai ekonomi bagi Masyarakat sebesar Rp410,3 miliar.

Pendapatan yang diperoleh Perum Perhutani dari pengembangan wisata alam adalah sebagai berikut:

- f) Tahun 2022 : Rp108,9 miliar
- g) Tahun 2023 : Rp108,9 miliar
- h) S.d. Mei 2024 : Rp90,3 miliar

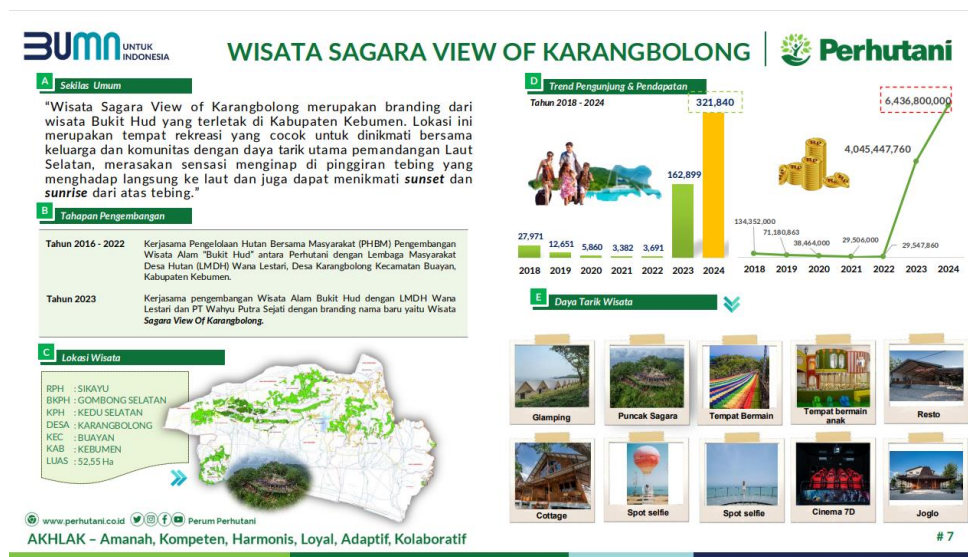
2) 10 Wisata Terbaik Perum Perhutani



3) Pengelolaan Wisata Sagara View of Karangbolong



4) Pengelolaan *Wisata Sagara View of Karangbolong*



Wisata Sagara View of Karangbolong merupakan branding dari Wisata Bukit Hud yang terletak di Kabupaten Kebumen, dengan daya tarik utama pemandangan Laut Selatan, merasakan sensasi menginap di pinggir tebing yang menghadap langsung ke laut, serta dan juga dapat menikmati *sunset* dan *sunrise* dari atas tebing.

Pengembangan *Wisata Sagara View of Karangbolong*

- Sejak tahun 2016 sampai dengan tahun 2022 dilakukan dengan pola kerja sama Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM), yaitu pengembangan Wisata Alam "Bukit Hud" antara Perhutani dengan Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) Wana Lestari, Desa Karangbolong Kecamatan Buayan, Kabupaten Kebumen.
- Mulai tahun 2023 dilakukan kerja sama pengembangan Wisata Alam "Bukit Hud" bersama LMDH Wana Lestari dan PT Wahyu Putra Sejati, dengan branding nama baru yaitu *Wisata Sagara View of Karangbolong*.

Gambaran jumlah pengunjung:

- Tahun 2022 : 3.691 pengunjung
- Tahun 2023 : 162.899 pengunjung
- S.d. Mei 2024 : 321.840 pengunjung

Total pendapatan yang diperoleh Perum Perhutani dari pengembangan wisata alam adalah sebagai berikut:

- a) Tahun 2022 : Rp29.54.860,00
- b) Tahun 2023 : Rp4.045.447.760,00
- c) S.d. Mei 2024 : Rp6.436.800.000,00

b. Penyampaian Informasi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

- 1) Wilayah kerja Perum Perhutani meliputi seluruh Kawasan Hutan Negara yang terdapat di Provinsi Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat dan Banten, kecuali Kawasan Hutan Konservasi. Kawasan Hutan tersebut terdiri atas Hutan Produksi dan Hutan Lindung. Demikian juga halnya dengan Lokasi Wisata *Sagara View of Karangbolong* di Hutan Produksi Terbatas.
- 2) Perum Perhutani dalam hal ini telah melakukan sinergi dengan Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem melalui pengembangan usaha yang tidak bersifat eksploitatif, salah satunya adalah pengembangan wisata alam, mengingat beberapa wilayah kerja Perum Perhutani yang berbatasan langsung dengan Kawasan Hutan Konservasi serta mengingat banyaknya wilayah kerja Perum Perhutani yang memiliki nilai konservasi tinggi (sebagaimana dalam RUU Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, diatur sebagai Areal Preservasi).
- 3) Wisata alam dinilai sebagai salah satu bentuk pengembangan usaha bidang kehutanan di masa depan, dalam rangka mitigasi perubahan iklim dan menjaga keanekaragaman sumber daya alam hayati, mengingat kegiatan wisata alam tidak dilakukan penebangan pohon dan tidak terdapat perubahan bentang alam yang dilakukan secara mendasar.
- 4) Dapat dilihat bahwa Wisata *Sagara View of Karangbolong* memiliki aksesibilitas yang sangat baik, yang merupakan salah satu syarat keberhasilan lokasi wisata, disamping keamanan dan keindahan desitasi wisata.

c. Penyampaian Informasi Manajemen PT Wahyu Putra Sejati

- 1) Saat ini tenaga kerja di Wisata *Sagara View of Karangbolong* berjumlah 105 orang, sedangkan warung Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) milik masyarakat setempat berjumlah hampir 30 warung.
- 2) Harapan ke depan:
 - a) Wilayah Karangbolong dapat dijadikan Kota Wisata, dengan didukung pedestrian (*trottoir*) bagi pengunjung yang berjalan kaki, untuk selanjutnya sektor swasta dapat berinvestasi membangun *home-stay* bernuansa tradisional.
 - b) Saat ini Kawasan Geopark Karangsambung-Karangbolong telah mendapat sertifikat sebagai Geopark Nasional, diharapkan ke depan dapat ditetapkan sebagai Geopark Internasional.

d. Penyampaian Informasi dan Aspirasi Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) Wana Lestari

- 1) Kronologis LMDH Wana Lestari:
 - a) Didirikan pada tahun 2006 sebagai mitra kerja Perum Perhutani.
 - b) Pada tahun 2016 LMDH Wana Lestari membuka wisata alam di Karangbolong.
 - c) Pada tahun 2019-2021 usaha wisata alam mengalami kerugian akibat Pandemi Covid-19.
 - d) Pada tahun 2022 mulai dijajagi prospek kerja sama pengembangan wisata alam dengan PT. Wahyu Putra Sejati, dan operasional usaha wisata alam Karangbolong, dan skema kerja sama mulai dilakukan pada tahun 2023.
- 2) Sumber pendapatan masyarakat berasal dari bagi hasil atas kerja sama wisata alam sebesar 10% dari pendapatan kotor.
- 3) Kewajiban LMDH Wana Lestari adalah menjaga keamanan serta kelestarian hutan di lokasi Wisata *Sagara View of Karangbolong*.
- 4) LMDH Wana Lestari memohon dukungan Komisi IV DPR RI terkait pengelolaan tegakan akasia di Petak 60, Dimana usulannya sudah disampaikan kepada Perum Perhutani.

- 5) Kegiatan LMDH Wana Lestari lainnya adalah pengembangan pertanian, berupa tanaman hortikultura.

Tanggapan Komisi IV DPR RI:

- a. Komisi IV DPR RI mengapresiasi kinerja Perum Perhutani yang telah berhasil melakukan pengembangan Wisata *Sagara View of Karangbolong* dengan terus melibatkan masyarakat desa hutan yang tergabung dalam LMDH Wana Lestari dan menggandeng pihak ketiga (sektor swasta) PT Wahyu Putra Sejati.
- b. Komisi IV DPR RI mendorong Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk melakukan inventarisasi potensi wisata alam di seluruh Indonesia. Selanjutnya Komisi IV DPR RI mendorong dilakukannya pengembangan usaha wisata alam dengan menggandeng pihak swasta/investor, dengan terus memberikan akses pengembangan wisata alam kepada masyarakat di dalam dan di sekitar kawasan hutan, dalam rangka mendukung upaya peningkatan kesejahteraan dan mutu kehidupan masyarakat.
- c. Komisi IV DPR RI meminta Perum Perhutani untuk melakukan kajian atas permohonan LMDH Wana Lestari untuk dapat mengelola tegakan akasia di Petak 60, dan menyampaikan laporan tertulis atas hasil kajian dimaksud dalam kesempatan pertama.

IV. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

- A. Komisi IV DPR RI mendukung Kementerian Pertanian untuk mengalokasikan program pompanisasi dan pengadaan sumur bor di daerah-daerah di Kabupaten Kebumen, mengingat kurangnya air pada musim kemarau, ketegantungan pada pengairan tadah hujan, serta permasalahan waduk yang mengering.
- B. Komisi IV DPR RI mendukung Kementerian Pertanian untuk melaksanakan pemberian bantuan alat dan mesin pertanian (alsintan) serta akses bantuan modal bagi petani yang membutuhkan dalam rangka mendukung penyediaan kebutuhan pangan masyarakat.
- C. Komisi IV DPR RI mendorong Pupuk Indonesia *Holding Company* dan Kementeriaan Pertanian untuk secara rutin melakukan pemutakhiran data

Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK), agar pelaksanaan program pupuk bersubsidi dapat dilakukan secara tepat sasaran dan sesuai kebutuhan.

- D. Komisi IV DPR RI memberikan apresiasi kepada Direktorat Jenderal Perikanan Budi daya Kementerian Kelautan dan Perikanan serta Pemerintah Kabupaten Kebumen yang telah mendukung ketersediaan serta tata kelola lahan yang baik, sehingga penyelenggaraan sistem tambak udang modern berbasis kawasan dapat menopang kebutuhan pangan manusia, disamping dapat dijadikan sebagai pusat edukasi wisata yang bermanfaat.
- E. Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk terus menjaga konsistensi penyelenggaraan sistem budi daya udang secara berkelanjutan melalui pendekatan 3 pilar, yakni ekonomi, sosial, dan ekologi (lingkungan).
- F. Komisi IV DPR RI mengapresiasi kinerja Perum Perhutani yang telah berhasil melakukan pengembangan Wisata *Sagara View of Karangbolong* dengan terus melibatkan masyarakat desa hutan yang tergabung dalam LMDH Wana Lestari dan menggandeng pihak ketiga (sektor swasta) PT Wahyu Putra Sejati.
- G. Komisi IV DPR RI mendorong Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk melakukan inventarisasi potensi wisata alam di seluruh Indonesia. Selanjutnya Komisi IV DPR RI mendorong dilakukannya pengembangan usaha wisata alam dengan menggandeng pihak swasta/investor, dengan terus memberikan akses pengembangan wisata alam kepada masyarakat di dalam dan di sekitar kawasan hutan, dalam rangka mendukung upaya peningkatan kesejahteraan dan mutu kehidupan masyarakat.
- H. Komisi IV DPR RI meminta Perum Perhutani untuk melakukan kajian atas permohonan LMDH Wana Lestari untuk dapat mengelola tegakan akasia di Petak 60, dan menyampaikan laporan tertulis atas hasil kajian dimaksud dalam kesempatan pertama.

V. PENUTUP

Demikian Laporan Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IV DPR Masa Sidang V Tahun Sidang 2023-2024 ke Provinsi Jawa Tengah. Selanjutnya Komisi IV DPR

RI akan menindaklanjuti aspirasi serta rekomendasi dalam Rapat Kerja maupun Rapat Dengar Pendapat bersama Mitra Kerja Komisi IV DPR RI. Semoga kunjungan kerja ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua.

Jakarta, 8 Juli 2024

Ketua Tim

Ttd.

Budhy Setiawan

A-290

LAMPIRAN DOKUMENTASI



LAMPIRAN MEDIA YANG MELIPUT

https://www.instagram.com/dpr_ri/reel/C89OTfISW7v/

<https://www.instagram.com/pemkabkebumen/reel/C87C5-mSGol/>

<https://emedia.dpr.go.id/2024/07/02/kawasan-wisata-karang-bolong-pesona-baru-kebumen-di-pulau-jawa-bagian-selatan/>

<https://ariefprasetyoadi.com/kunker-dengan-komisi-iv-dpr-ri-kepala-nfa-arief-prasetyoadi-beri-eksplanasi-keteraturan-hulu-sampai-hilir-untuk-dukung-optimasi-penyerapan-bulog/>

<https://www.instagram.com/pemkabkebumen/p/C86G8BLSp4e/>

<https://twitter.com/Gerindra/status/1739850518305099918>

<https://website.kubekkp.coofis.com/djpb/kkp-dan-komisi-iv-dpr-dorong-keterlibatan-masyarakat-lokal-dalam-modelling-tambak-udang-modern-di-kebumen65c2ffdb1e710/detail>

<https://images.app.goo.gl/fsFPLrtchJhUxLzQ7>

<https://images.app.goo.gl/5QjyaC3GMt9KkphD7>

<https://images.app.goo.gl/zZh1Mdq3FjR6Nyv6>

<https://prokopimsetda.kebumenkab.go.id/>

https://www.instagram.com/p/C8zD_OrSYkA/

LAMPIRAN MITRA PENDAMPING

KEMENTERIAN PERTANIAN	✓ Direktur Jenderal Sarana dan Prasarana Pertanian Ir. ALI JAMIL, M.P., Ph.D.
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	1. Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Prof. Dr. SATYAWAN PUDYATMOKO, S.Hut., M.Sc. 2. Direktur Bina Pengelolaan dan Pemulihan Ekosistem Dr. Ir. AMMY NURWATI, M.M. 3. Direktur Bina Rencana Pemanfaatan Hutan C. HENDRO WIDJANARKO, S.Hut.
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN	1. Direktur Jenderal Perikanan Budi Daya Dr. Tb. HAERU RAHAYU, A.Pi., M.Sc. 2. Direktur Kawasan dan Kesehatan Ikan, Ditjen PBD TINGGAL HERMAWAN, S.Pi., M.Si.
BADAN PANGAN NASIONAL	✓ Kepala Badan Pangan Nasional H. ARIEF PRASETYO ADI, S.T., M.T.
PERUM PERHUTANI	1. Direktur Operasi Ir.NATALAS ANIS, M.Sc. 2. Wakil Kepala Divisi Regional Jawa Tengah CUCU SUPARMAN, S.Hut.
PERUM BULOG	✓ Direktur Transformasi dan Hubungan Kelembagaan SONYA MAMORISKA
ID FOOD	✓ Direktur Utama PT Perindo SIGIT MUHARTONO
PUPUK INDONESIA HOLDING COMPANY	1. Dir. Manajemen Resiko PT Pupuk Indoensia (Perseto) NINIS KESUMA ADRIANI 2. Dir. Keuangan & Umum PT Pupuk Sriwijaya SYAIFULLOH LASINDRANG